

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL-UGM. 1991. Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung Jawab. Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Untuk Tahun Anggaran 2013.
- _____. 2014. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Untuk Tahun Anggaran 2014.
- _____. 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Untuk Tahun Anggaran 2015.
- _____. 2016. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Untuk Tahun Anggaran 2016.
- _____. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Untuk Tahun Anggaran 2017.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. 2013. Rencana Strategis BPKAD Kota Palembang Tahun 2013-2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikbud RI. 2016. *Kendali Pengendalian*. Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengendalian>.
- Bisma, I Dewa Gde&Susanto, Hery. 2010. "Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007". *Jurnal Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3*.
- Berita Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. 2018. *Kota Palembang Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian*. Dikutip dari <http://www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/palembang/id/berita/berita-terbaru/202-berita-kantor-pelayanan-perbendaharaan-negara/2847-kota-palembang-meraih-opini-wajar-tanpa-pengecualian-wtp.html>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah*. Dikutip dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5747>.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2017. *Setelah TA 2006*. Dikutip dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>.
- Faud, Ramli Muhammad. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Hakim, M. F. 2018. Analisis Kinerja Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2010-2016. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. 2014. “Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)”. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*, 22(2).
- KS, Lazyra S. 2016. Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Univeristas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Natalia, L., & Astuti, T. D. 2016. “Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman”. *Jurnal SosioHumaniora*, 6(1).
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- _____. 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- _____. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- _____. 2009. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- _____. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- _____. 2017. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 117/PMK.07/2017 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjam Daerah Tahun Anggaran 2018.

- Pramono, J. 2014. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)". *Jurnal Ilmiah Among Makarti*, 7(13).
- Ritonga, I. T. 2014. "Developing a Measure of Local Government's Financial Condition". *Journal of Indonesian Economy and Business*, 29(2), 142-164.
- Ritonga, I. T., Clark, C., & Wickremasinghe, G. 2012. "Assessing financial condition of local government in Indonesia: an exploration". *Public and Municipal Finance*, 1(2), 37-50.
- Sabri, N. R., & Jaber, R. Y. 2007. "Financial Analysis of Palestinian Local Government". *Available at SSRN 1098033*.
- Sari, I. I., & Yousida, I. 2019. "Analisis Laporan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 5(1).
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanto, H. 2019. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram". *Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(1), 81-92.